

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman milenial saat ini negara Indonesia adalah negara yang ikut serta dalam perkembangan teknologi dunia. Teknologi yang saat ini berkembang di Negara Indonesia, digunakan dalam berbagai sektor, baik dalam bidang pendidikan, industri perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam rangka persaingan yang sangat ketat Indonesia telah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi yang mendukung kelancaran dan ketepatan sasaran dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif diberbagai organisasi.

Salah satu bidang yang ikut menggunakan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini adalah dibidang pendidikan. Dengan adanya teknologi yang mendukung kelancaran proses pendidikan hal tersebut digunakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan dan mampu mendukung program pemeritah secara efektif dan efisien. Diera milenial saat ini, dalam segala kegiatan meggunakan teknolongi. Perkembangan teknologi pada saat ini didukung dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam menggapai keefektivan dan efisensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lembaga swasta

dan lembaga pemerintahan perlahan menggunakan sistem-sistem yang dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan. Dalam penjaminan mutu pendidikan di instansi pemerintahan juga diperlukannya perkembangan teknologi dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

Pendidikan menjadi topik utama yang dapat membangun suatu negara dalam bersaing pada bangsa-bangsa lain. Maka dari itu, pendidikan menjadi syarat penting bagi suatu negara untuk memenangi kompetisi global. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mulai tahun 1984, pemerintah telah mengupayakan pemerataan pendidikan, dilanjutkan pada tahun 1994 program wajib belajar pendidikan sembilan tahun, adanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh berupa beasiswa pendidikan yang dilaksanakan pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, dan saat ini program diganti dengan nama BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk sekolah dasar.

Pemerintah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan memenuhi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 (*mandatory spending*), seperti anggaran pendidikan dalam APBN 2018 tetap dijaga sebesar 20%. Bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, diantaranya melalui peningkatan akses program Indonesia

Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka *sustainable education*.¹

Dari pernyataan di atas, dijelaskan bahwa dana APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan sebesar 20% untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang disebar seluruh Indonesia. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan dirasa masih sangat kurang untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap daerah.

Dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini maka pemerintah dapat mempergunakannya dan memanfaatkan dalam penyaluran bantuan pemerintah, serta dana yang dikeluarkan pemerintah akan tepat sasaran dalam memajukan pendidikan hingga ke daerah yang susah dijangkau oleh pemerintah pusat. Sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemendikbud), Supriano mengungkapkan, terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Keempat aspek itu yakni

¹ (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>) diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 12.05 WIB

kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran.²

Pemerintah Pusat membantu sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan dalam memenuhi standar pendidikan. Melalui dana APBN yang dikeluarkan pemerintah sekolah dapat mengelolanya sesuai dengan kebijakan. Salah satu peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan infrastruktur sekolah. Infrastruktur sekolah dapat disebut sebagai sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di sekolah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar menggunakan media-media pembelajaran yang tersedia di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 membahas Tentang Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Ketentuan sarana dan prasarana Sekolah Dasar terdapat ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang Unit Kesehatan sekolah (UKS), jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain dan berolahraga.

Salah satu visi yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Direktorat Pembinaan sekolah dasar adalah Mewujudkan

² (<https://news.okezone.com/read/2018/08/21/1/1939466/4-aspek-penting-dalam-upaya-meningkatkan-mutu-pendidikan>) diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 12.20

penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan membantu penguatan kapasitas Tata Kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor ditingkat nasional, mewujudkan birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menjadi teladan dalam Tata Kelola yang bersih, efektif dan efisien.³ Dalam renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) penguatan Tata Kelola dilakukan untuk peningkatan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bersih tidak adanya campur tangan pihak-pihak lain dan dalam upaya mengefektivaskan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah hingga terciptanya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Mulai tahun 2016 pemerintah dengan dibantu tim SMK membuat aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD). Aplikasi tersebut merupakan sebuah inovasi dalam bidang teknologi dan perkembangan dalam membantu penyaluran bantuan pemerintah. Aplikasi TAKOLA SD digunakan di Sub. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan

³ Rencana Strategis Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, h.31

Kebudayaan dalam mempermudah penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran dan dapat menghemat berbagai sumberdaya.

Sub. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar membantu mewujudkan mutu pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah yang merambah hingga sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Untuk menyalurkan bantuan pemerintah, sub. Bidang kelembagaan dan sarana prasarana melakukan kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Pembangunan yang ada di kabupaten atau kota. Dengan kerjasama tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dapat menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran dan diharapkan tidak terdapat lagi penyelewengan penyaluran bantuan pemerintah. Setiap tahunnya banyak sekolah yang memerlukan bantuan pemerintah khususnya bantuan rehabilitasi ruang belajar yang diakibatkan kerusakan akibat bencana alam dan lain sebagainya. Dari dana yang tersedia dengan jumlah kerusakan ruang kelas yang banyak maka pemerintah pusat harus menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran.

Di bawah ini terdapat berita mengenai usaha kemendikbud dalam upaya penggunaan sistem Tata Kelola SD yang digunakan Subdit Sarana dan Prasarana dalam upaya penyaluran bantuan pemerintah secara efektif.

Kemendikbud akan Rancang Model Tata Pembangunan Sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana merancang model tata kelola pembangunan fisik sekolah yang lebih baik. Rencana tersebut, sebagai respons atas banyaknya bangunan sekolah yang rusak akibat bencana alam, atau lainnya. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Wowon Hidayat menyebutkan, jangka waktu kerusakan bangunan sekolah kerap tidak masuk akal. Sebab, Kemendikbud sendiri, menargetkan rehabilitasi bangunan sekolah setiap 10 tahun sekali, namun kenyataannya banyak bangunan sekolah yang sudah rusak dalam tiga atau empat tahun. "Kami dari kementerian punya komitmen menjaga kualitas bangunan dengan baik. Tata kelolanya kebanyakan di daerah itu tata kelolanya kurang bagus, banyak potongan dan lain-lain. Akhirnya, kualitas bangunan jadi jelek," ungkap Wowon kepada *Republika.co.id*, Jumat (22/12). Dari 149.552 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN), sebanyak 11.725 ruang kelas di antaranya rusak dan 49.074 unit rusak berat. Pemerintah pun menetapkan langsung sekolah yang akan direhab, tidak harus menunggu pengajuan bantuan dari pemerintah daerah. "Selain rehabilitasi fisik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) juga terus jalan. Rehabilitasi dilakukan di daerah konflik dan rawan bencana alam," kata Wowon menjelaskan. Wowon

mengatakan, perbaikan sekolah rusak sudah dilakukan sejak awal tahun 2017. Di antaranya sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Papua dan Maluku. Bukan hanya yang berada dipinggiran ibu kota, seperti Sukabumi, Cianjur, dan Purwakarta juga ada yang direhab.⁴

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa adanya Tata Kelola yang disusun pemerintah dalam upaya penyaluran bantuan pemerintah dirasa sudah efektif dan tepat sasaran. Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD) sangat membantu pemerintah dalam penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana di sub. Bidang Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud. Dengan adanya Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD) penyaluran bantuan pemerintah dirasa sudah efektif yang sebelumnya menggunakan proposal pengajuan dana rehabilitasi yang memerlukan banyak bantuan pihak-pihak yang lain.

Penyaluran bantuan pemerintah untuk pendidikan sekolah dasar seringkali terjadi penyimpangan di lapangan. Salah satu masalah yang terjadi karena Data Kondisi Fisik SD dalam Dapodik belum akurat. Hal ini terjadi karena data diinput oleh operator Dapodik yang tidak paham teknis bangunan, dan data tidak menyajikan foto-foto sekolah yang akurat. Untuk mengatasi masalah ini perlu terobosan baru dalam pendataan agar

⁴ (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/22/p1cuqm423-kemendikbud-akan-rancang-model-tata-pembangunan-sekolah>) diakses paada tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 14.55

bantuan tidak salah sasaran. Dengan adanya hal tersebut perlu dihasilkan data verifikasi sarana prasarana yang akurat dengan cara mengubah manajemen lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Proses pendataan melibatkan 611 SMK jurusan teknik bangunan yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pihak SMK dikerahkan untuk mencatat data sarana prasarana di sekolah SD dengan mengunjungi sekolah secara langsung. Diharapkan peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam Tata Kelola prasarana SD, antara lain mendorong sekolah untuk mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara optimal, terutama data sarana prasarana, mengupayakan seluruh SD untuk disurvei melalui Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD) guna menjalankan kebijakan Direktorat Pembinaan SD untuk menyusun “*Golden Data Record*” (master data prasarana 148.000 SD).⁵

Dengan adanya Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD) yang dibantu oleh SMK Pembangunan yang ada di kabupaten atau kota membantu proses verifikasi data sekolah yang memerlukan bantuan pemerintah berupa rehabilitasi sekolah, pengadaan perpustakaan dan lain sebagainya akan efektif sampai langsung ke rekening sekolah. Menjadikan informasi yang tersedia menjadi data yang akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

⁵ Hamid Muhammad, dkk, *Inovasi Tata Kelola Sekolah Dasar*, (Jakarta: Dit. PSD Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, 2017) h.303-306

Berdasarkan hasil wawancara saat melaksanakan observasi pada tanggal 25 September 2018, di sub. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas menyalurkan bantuan pemerintah untuk membangun mutu sarana dan prasarana sekolah dasar di Indonesia. Dengan adanya Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD). Sub. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana dapat menyalurkan bantuan pemerintah secara efektif. Di ungkapkan oleh Pak Agung sebagai Kepala Seksi Kelembagaan, bahwa dua tahun sebelum adanya aplikasi Takola SD, sub. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana membuka sistem penyerahan proposal dari sekolah yang memerlukan bantuan berupa rehabilitasi kelas, perpustakaan, ruang kelas baru, renovasi, kantin dan sanitasi. Hal tersebut dirasa sangat tidak efektif karna banyak keluhan-keluhan yang diungkapkan pihak sekolah dasar bahwa pembuatan proposal permohonan dana bantuan memerlukan jasa yang mengakibatkan banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga dana yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya digunakan oleh sekolah. Dengan adanya aplikasi Manajemen Takola SD diupayakan meminimalisir kerugian-kerugian yang yang didapat.

Berangkat dari hal yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkan fenomena tersebut. Peneliti tertarik mengusung tema efektivitas penggunaan Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD)

dalam penyaluran bantuan pemerintah di Sub. Kelembagaan dan Bidang Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari penggunaan Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD) dalam penyaluran bantuan pemerintah di sub. Kelembagaan dan Bidang Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun judul Penelitian ini adalah **“Efektivitas Manajemen Tata Kelola Sekolah Dasar dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah di Subdit Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”**.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka fokus penelitian yang peneliti angkat adalah Efektivitas Manajemen Tata Kelola Sekolah Dasar dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah. Dalam hal ini, peneliti membatasi permasalahan dengan sub fokus penelitian yaitu efektivitas perencanaan (*planing*) penyaluran bantuan pemerintah menggunakan aplikasi TAKOLA SD, efektivitas Pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah, dan Efektivitas Pengawasan (*controlling*) penyaluran bantuan pemerintah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diajukan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana efektivitas perencanaan penyaluran bantuan pemerintah menggunakan aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD)?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah?
3. Bagaimana efektivitas pengawasan penyaluran bantuan pemerintah?

D. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data melihat secara langsung efektivitas penyaluran bantuan pemerintah dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyaluran bantuan pemerintah di Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkuat pemahaman terkait efektivitas manajemen Tata Kelola Sekolah Dasar yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan dalam proses penyaluran bantuan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan atau rekomendasi yang bermanfaat bagi sub. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam efektivitas penyaluran bantuan pemerintah secara efektif dan efisien.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti setelah melaksanakan observasi langsung terkait efektivitas manajemen Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD). Serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti setelah membandingkan hasil pengamatan tersebut dengan teori-teori yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan.

3. Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mandaat bagi siapa saja yang membaca dan juga penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang serta akan mengkaji lebih dalam mengenai topik yang sama.